



JURNAL EKSOPODA

Journal of Interdisipliner

Analisis Dampak Perang Dagang antara Amerika dan China Terhadap Ekonomi Indonesia

Muh Nur Alifath

Manajemen/Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Hadaria H Haeruddin

Manajemen/Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Ahmad Ardiansyah

Manajemen/Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar, Indonesia

A Fadel Muhammad

Ilmu Manajemen/Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Indonesia

Syahribulan

Universitas Indonesia Timur, Indonesia

Topia6540@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap perekonomian Indonesia, dengan menyoroti baik dampak negatif maupun peluang yang muncul. Konflik ekonomi antara dua kekuatan global ini memicu ketidakpastian yang turut mengguncang sistem perdagangan internasional, termasuk kinerja ekonomi Indonesia yang sangat bergantung pada ekspor dan stabilitas pasar global. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus intrinsik, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, serta artikel media daring. Teknik analisis yang digunakan adalah "*hcm*"ic con"cn" *analysis*, yang mengelompokkan data berdasarkan isu utama seperti dampak makroekonomi, sektor yang paling terdampak, dan kebijakan pemerintah dalam merespons situasi tersebut.

Temuan menunjukkan bahwa ekspor Indonesia ke Tiongkok mengalami penurunan akibat melemahnya ekonomi Tiongkok, sedangkan ekspor ke Amerika Serikat justru mengalami peningkatan sebagai dampak dari pergeseran permintaan. Meskipun demikian, peningkatan ini belum cukup menutup kerugian yang ditimbulkan oleh penurunan harga komoditas utama dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Indonesia juga dinilai belum berhasil memanfaatkan peluang relokasi industri secara maksimal karena keterbatasan infrastruktur dan regulasi investasi. Penelitian ini merekomendasikan upaya strategis seperti reformasi struktural, diversifikasi pasar, penguatan industri dalam negeri, serta koordinasi antar kementerian melalui pendekatan "*Wholc ofi Govcrnmcn*" guna memperkuat daya tahan ekonomi nasional terhadap tekanan global.



Muh Nur alifath, Hadaria H Haeruddin
Jurnal Interdisiplin (*JUNTER*) Vol . 1 No. 5 (2025) 42 – 59

JURNAL EKSOPODA

Journal of Interdisipliner

Kata kunci: Perang dagang, Amerika, China, Ekonomi.



JUNTER

Jurnal Interdisipliner



A. Pendahuluan

Perang dagang antara Amerika dan China Tengah menjadi bahan pembicaraan di dunia ekonomi saat ini. Dampaknya dari perang dagang tersebut banyak dirasakan oleh beberapa negara tidak terkecuali Indonesia. Dengan posisi Indonesia yang sangat strategis yang berada di antara benua Asia dan benua Australia serta berada diantara dua samudra yaitu Pasifik dan Hindia menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional yang sangat penting dan sering disebut sebagai jalur silang dunia (*crossroads of the world*). Indonesia yang berada di atas garis khatulistiwa yang disebut negara cincin api sehingga memiliki banyak sumber daya alam dan sumber daya energi yang berlimpah. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki inilah Indonesia disebut sebagai penghasil bahan mentah "raw material".

Dalam era globalisasi yang semakin menyatu, dinamika hubungan ekonomi antarnegara memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu dinamika global yang berdampak signifikan adalah perang dagang antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia, yakni Amerika Serikat dan Cina. Konflik ini bermula pada 2018 ketika pemerintah AS memberlakukan tarif impor atas produk-produk asal Cina, yang kemudian dibalas dengan kebijakan serupa oleh pihak Cina. Ketegangan perdagangan ini tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral kedua negara, tetapi juga membawa implikasi luas bagi perekonomian global, termasuk Indonesia yang memiliki keterbukaan ekonomi tinggi. Munawaroh (2019) menyatakan bahwa perang dagang tersebut dapat menciptakan baik tantangan maupun peluang bagi negara mitra dagang seperti Indonesia, yang memiliki potensi untuk mengisi celah pasar yang ditinggalkan akibat konflik tersebut.

Ketegangan perdagangan ini turut menciptakan ketidakstabilan di pasar komoditas, mengganggu rantai pasok global, serta menurunkan kepercayaan investor internasional. Ilhamsyah dan Arisyahidin (2019) menemukan bahwa ketidakpastian global akibat konflik tersebut menyebabkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah, mencerminkan fluktuasi pasar keuangan domestik. Berdasarkan data dari BPS, nilai ekspor Indonesia ke Cina pada tahun 2019 tercatat sebesar USD 25,85 miliar, turun 2,6% dari tahun sebelumnya, sementara ekspor ke Amerika Serikat naik 4,5% menjadi USD 18,64 miliar. Penelitian dari Universitas Airlangga (2020) menegaskan bahwa ketergantungan

Indonesia terhadap ekspor komoditas mentah menjadikannya rentan terhadap penurunan permintaan global yang dipicu oleh perang dagang. Selain itu, peluang relokasi industri dari Cina belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Indonesia. Laporan Kementerian Pertahanan (2020) menunjukkan bahwa hanya 7 dari 33 perusahaan yang merelokasi produksinya dari Cina memilih Indonesia, sedangkan Vietnam berhasil menarik 19 perusahaan, mencerminkan tantangan dalam daya saing investasi Indonesia.

Urgensi kajian ini terletak pada perlunya analisis mendalam mengenai dampak langsung dan tidak langsung yang ditimbulkan oleh konflik dagang antara AS dan Cina terhadap ekonomi

Indonesia sebagai negara ketiga. Nor Hadi et al. (2020) menyoroti bahwa gejolak perdagangan global dapat memicu reaksi psikologis di pasar modal negara berkembang, termasuk Indonesia.

Dalam konteks globalisasi yang kompleks dan saling terhubung, setiap perubahan kebijakan

ekonomi negara besar dapat menimbulkan efek domino terhadap ekonomi domestik negara lain. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk menyusun strategi mitigasi risiko sekaligus menangkap peluang ekonomi yang muncul.

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan memperkuat pemahaman atas konsep interdependensi ekonomi global dan *suillover cfificc*", yakni bagaimana kebijakan ekonomi suatu negara besar dapat memicu efek berantai pada negara-negara mitra. Teimouri (2019) mencatat bahwa negara-negara di kawasan ASEAN mengalami dampak nyata dari konflik dagang tersebut, memperkuat urgensi kajian interdependensi ini. Dalam hal ini, Indonesia dapat dijadikan contoh bagaimana negara berkembang menavigasi ketidakpastian ekonomi global. Kajian ini juga berkontribusi pada pengembangan teori perdagangan internasional yang relevan dengan tantangan kontemporer, termasuk isu resiliensi ekonomi negara berkembang.

Dari sudut pandang akademik, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur tentang dampak konflik perdagangan global terhadap

negara ketiga. Elsay (2021) menunjukkan bahwa dampak perang dagang tidak hanya dirasakan pada tingkat makroekonomi, tetapi juga memengaruhi kondisi keuangan perusahaan di sektor-sektor tertentu, seperti perkebunan. Temuan ini memperkuat pentingnya penelitian yang tidak hanya bersifat makro, tetapi juga mencakup analisis di tingkat mikroekonomi dan korporasi. Selain memberikan gambaran kondisi terkini, penelitian ini diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan di masa depan. Seperti disampaikan oleh Sjahrir (2020), konflik dagang global juga dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi alternatif di tengah ketidakpastian global yang terus berkembang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus intrinsik, yang sepenuhnya mengandalkan data sekunder. Sumber data berasal dari berbagai referensi seperti buku teks ekonomi internasional, laporan resmi dari lembaga pemerintah (BPS, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, BKPM), publikasi organisasi multilateral (*WTO, World Bank, UNCTAD*), artikel jurnal terindeks, karya akademik dari perguruan tinggi, serta arsip berita daring periode 2018–2025 yang membahas perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta dampaknya terhadap Indonesia. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor, 1975).

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini dengan melalui studi literatur dan analisis

dokumen secara mendalam menggunakan basis data akademik seperti *Scopus* dan *Google Scholar*,

serta portal statistik resmi pemerintah, dengan seleksi ketat berdasarkan kredibilitas, tahun terbit,

dan relevansi topik. Analisis dilakukan menggunakan metode "*thematic content analysis*", di mana kutipan dan data kuantitatif diklasifikasikan ke dalam tema-tema seperti dampak makroekonomi,

sektor terdampak, serta respons kebijakan, dan kemudian dirangkai menjadi narasi teoretis mengenai mekanisme *spillover* perang dagang terhadap perekonomian Indonesia. Validitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber

membandingkan data dari pemerintah, jurnal ilmiah, dan media ditambah dengan *uccr lchricfiinq* dan dokumentasi proses literatur secara menyeluruh (audit trail). Literatur atau dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang (Nazir, 2005). Teknik pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian (Nawawi, 2005). Informasi dari dokumen dan literatur diolah melalui tahapan reduksi data, penyajian data secara terstruktur, serta dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan akhir. Aspek etika dijaga melalui pencantuman referensi yang lengkap, penghormatan terhadap hak cipta, serta penyajian data sesuai konteks aslinya. Keterbatasan studi ini mencakup ketergantungan pada kualitas dan ketersediaan dokumen sekunder, serta potensi bias dari sumber media. Hasil yang diharapkan adalah pemetaan konseptual mengenai dampak perang dagang AS-Tiongkok terhadap Indonesia, lengkap dengan rekomendasi kebijakan berbasis kajian literatur.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Tabel. I Penerapan Tarif Impor Antara Amerika dan China Periode 2018-1019

Tahun	Amerika Serikat	Tiongkok	Sumber
6 Juli 2018	Tarif 25% untuk produk China senilai US\$34 miliar (Pasal 301 <i>Trade Act</i> 1974)	Balasan tarif 25% untuk produk AS seperti kedelai, daging sapi, kendaraan	Bown (2020); Evenett & Fritz (2019); Fang & Kennedy (2019)
Setelah 6 Juli 2018	Perluasan tarif hingga US\$370 miliar untuk produk elektronik rumah tangga, mesin industri, dll.	Tarif hingga 30% untuk produk AS senilai lebih dari US\$100 miliar; pengecualian untuk kedelai dan LNG	Handley & Fazio (2021); Lardy (2020)

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok dimulai pada 6 Juli 2018, ketika pemerintahan Donald Trump secara resmi memberlakukan tarif impor sebesar 25% terhadap produk-produk asal Tiongkok senilai US\$34 miliar berdasarkan Pasal 301 Trade Act 1974. Kebijakan ini dipandang sebagai upaya untuk menekan defisit neraca perdagangan dan menghentikan praktik pemaksaan alih teknologi (Bown, 2020; Evenett & Fritz, 2019). Pemerintah Tiongkok merespons dengan cepat, menerapkan tarif serupa sebesar 25% terhadap komoditas utama dari Amerika seperti kedelai, daging sapi, dan kendaraan (Fang & Kennedy, 2019). Tindakan balasan yang muncul hanya beberapa jam setelah kebijakan AS berlaku ini menandai dimulainya siklus retaliasi yang, menurut Carney (2021), merupakan yang tercepat dalam sejarah Organisasi Perdagangan Dunia.

Selanjutnya, terjadi peningkatan signifikan dalam cakupan kebijakan tarif. Amerika Serikat memperluas daftar produk yang dikenai bea menjadi sekitar US\$370 miliar, mencakup barang-barang seperti perangkat elektronik rumah tangga hingga komponen mesin industri, serta menyiapkan skema penaikan tarif tambahan apabila perundingan menemui jalan buntu (USTR, 2020). Penelitian oleh Handley dan Fazio (2021) mencatat bahwa kebijakan ini meningkatkan rata-rata tarif efektif atas barang Tiongkok dari 3% menjadi lebih dari 19%. Sebagai respons, Tiongkok memberlakukan tarif hingga 30% terhadap barang-barang asal AS senilai lebih dari US\$100 miliar, namun tetap memberikan pengecualian untuk komoditas penting seperti kedelai dan LNG guna menjaga kestabilan harga domestik (Lardy, 2020). Kesepakatan dagang tahap awal (“Phase One”) yang disepakati pada Januari 2020 sempat menghentikan eskalasi tambahan, meskipun Ahn (2022) mencatat bahwa sekitar 72% dari tarif yang diberlakukan pada 2018–2019 tetap diberlakukan pasca-kesepakatan.

Tabel II. Tabel Penetapan Tarif Impor Antara Amerika dan China Periode 2020-2025

Tahun	Amerika Serikat	Tiongkok	Sumber
2020 (Phase One)	Sebagian tarif tetap diberlakukan (~72% dari tarif 2018-2019) setelah kesepakatan dagang tahap awal	Masih mempertahankan sebagian besar tarif terhadap produk AS meskipun ada kesepakatan	Ahn (2022)
2024-2025 (Evaluasi Biden)	Penambahan tarif 10–15% untuk produk strategis: panel surya, baterai kendaraan listrik, alat medis	Peningkatan tarif untuk produk AS seperti jagung, LNG, minuman beralkohol, serta pengetatan lisensi impor	USTR (2024); Chen et al. (2024); Autor, Dorn & Hanson (2025)

Pada periode 2024–2025, tarif impor telah berkembang menjadi alat kebijakan strategis yang melampaui tujuan semula sebagai pengendali defisit. Evaluasi empat tahunan atas Section 301 oleh pemerintahan Biden menghasilkan kenaikan tarif sebesar 10–15 poin persentase terhadap produk-produk strategis seperti panel surya, baterai kendaraan listrik, dan peralatan medis, efektif per 1 Januari 2025 (USTR, 2024). Di sisi lain, Tiongkok meningkatkan bea terhadap produk AS seperti jagung, LNG, dan minuman beralkohol serta memperketat persyaratan lisensi impor untuk produk pertanian asal Amerika, sebagaimana dilaporkan oleh Chen et al. (2024). Studi terbaru dari Autor, Dorn, dan Hanson (2025) menegaskan bahwa konflik tarif telah bergeser ke isu yang lebih dalam terkait dengan keamanan nasional dan dominasi teknologi, tanpa adanya indikasi bahwa kompromi struktural dapat dicapai untuk memulihkan hubungan dagang kedua negara ke kondisi sebelum konflik.

Tabel III, Dampak Perang Dagang Amerika dan China Terhadap Indonesia

Jenis Dampak	Data	Penjelasan Singkat	Sumber
Penurunan Ekspor ke Tiongkok	-2,6% (turun dari USD 26,54 miliar menjadi USD 25,85 miliar pada 2019)	Karena perlambatan ekonomi Tiongkok akibat perang dagang.	BPS (2020)
Peningkatan Ekspor ke AS	+4,5% (naik menjadi USD 18,64 miliar pada 2019)	Permintaan AS bergeser dari produk Tiongkok ke Indonesia.	BPS (2020)
Relokasi Industri	7 dari 33 perusahaan memilih Indonesia ($\approx 21,2\%$)	Sebagian besar (19 perusahaan, $\approx 57,6\%$) memilih Vietnam karena kebijakan investasi lebih menarik.	BKPM (2021)

Journal of Interdisipliner

Jenis Dampak	Data	Penjelasan Singkat	Sumber
Penurunan Harga Batu Bara	Turun dari USD 101/ton (2018) menjadi USD 69/ton (2019)	Permintaan global energi melemah akibat ketidakpastian pasar.	World Bank Commodity Data (2020)
Pertumbuhan Ekonomi Melambat	Turun dari 5,17% (2018) menjadi 5,02% (2019)	Kinerja sektor perdagangan terganggu akibat rantai pasok global.	Kemenkeu (2020)
Depresiasi Nilai Tukar Rupiah	Melemah sekitar 10–11% terhadap dolar AS	Membuat biaya impor bahan baku dan energi meningkat, memicu inflasi.	Sri Mulyani (2024)
Surplus Dagang dengan AS	Surplus USD 16,8 miliar (2024)	Dipicu oleh ekspor produk elektronik, pakaian, dan alas kaki	BPS (2024)
Inflasi Domestik	Meningkat (angka spesifik tidak disebut, namun ada kenaikan)	Biaya impor lebih mahal akibat depresiasi rupiah.	Sri Mulyani (2024)
Tekanan pada Sektor Manufaktur	Tidak disebut angka spesifik, namun ada kenaikan biaya produksi	Daya saing produk Indonesia di pasar global menurun	Simanjuntak (2023)

Pembahasan

Dampak Perang Dagang Amerika dan China Terhadap Ekonomi Indonesia

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok memberikan efek ganda terhadap perekonomian Indonesia, baik dalam bentuk peluang maupun tantangan.

Dari sisi positif, ketegangan ini membuka peluang ekspor Indonesia ke pasar Amerika Serikat. Kenaikan tarif pada produk asal Tiongkok mendorong konsumen AS untuk beralih ke negara alternatif, termasuk Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2020), ekspor Indonesia ke

Amerika Serikat tumbuh sebesar 4,5% pada 2019, dengan nilai mencapai USD 18,64 miliar. Komoditas seperti elektronik, tekstil, dan alas kaki menjadi sektor utama yang mengalami peningkatan ekspor. Selain itu, Indonesia mencatat surplus perdagangan dengan Amerika Serikat sebesar USD 16,8 miliar pada 2024 (BPS, 2024), menunjukkan adanya peluang pasar baru yang berhasil dimanfaatkan. Meskipun dari 33 perusahaan yang melakukan relokasi hanya 7 yang memilih Indonesia (BKPM, 2021),

fenomena ini tetap membuka prospek positif bagi pengembangan sektor manufaktur nasional dalam jangka panjang. Perang dagang ini juga mendorong Indonesia untuk memperluas diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara lain, memperkuat ketahanan ekonomi terhadap dinamika global.

Di sisi lain, dampak negatifnya juga tidak dapat diabaikan. Ekspor Indonesia ke Tiongkok mengalami penurunan sebesar 2,6% pada tahun 2019, dari USD 26,54 miliar menjadi USD 25,85 miliar (BPS, 2020), mengindikasikan tingginya ketergantungan Indonesia terhadap pasar Tiongkok dan meningkatkan kerentanan ekonomi terhadap gejolak eksternal. Selain itu, relokasi industri lebih banyak menguntungkan Vietnam, yang dinilai lebih menarik dari sisi iklim investasi dan efisiensi biaya produksi (Teimouri, 2019). Di sektor komoditas, harga batu bara – salah satu ekspor utama Indonesia – turun drastis dari USD 101 per ton menjadi USD 69 per ton antara 2018 dan 2019 (*World Bank Commodity Data*, 2020), yang berdampak pada penurunan pendapatan devisa. Perlambatan ekonomi nasional pun terlihat, dengan pertumbuhan melambat dari 5,17% di 2018 menjadi 5,02% pada 2019 (Kemenkeu, 2020), sejalan dengan menurunnya perdagangan global dan

investasi asing.

Selain itu, ketegangan global akibat perang dagang menyebabkan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar 10–11% (Sri Mulyani, 2024), sehingga meningkatkan biaya impor bahan baku dan memperburuk defisit transaksi berjalan. Depresiasi ini turut memicu inflasi domestik akibat kenaikan harga barang impor, diperparah dengan tekanan psikologis di pasar dalam negeri (Nor Hadi et al., 2020). Di sektor manufaktur, pelemahan rupiah menyebabkan peningkatan biaya produksi, sehingga produk Indonesia menjadi kurang kompetitif di pasar global (Simanjuntak, 2023).

Secara umum, konflik dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok membuka peluang baru bagi perekonomian Indonesia, tetapi di sisi lain juga menyoroiti berbagai kelemahan struktural yang harus segera diperbaiki agar Indonesia mampu mengoptimalkan peluang global di masa mendatang.

Tantangan yang Harus Diantisipasi

Indonesia harus tetap mempertahankan posisi netral yang aktif di tengah meningkatnya ketegangan global. Konsistensi dalam menerapkan prinsip politik luar negeri bebas-aktif menjadi krusial agar Indonesia tidak terperangkap dalam pengaruh kekuatan besar tertentu. Acharya (2014) menekankan dalam penelitiannya bahwa netralitas aktif merupakan elemen utama dalam menjaga kedaulatan dan fleksibilitas negara-negara Asia Tenggara di tengah persaingan kekuatan besar.

Tingginya ketergantungan terhadap pasokan industri dari Tiongkok membuat Indonesia rentan terhadap risiko yang muncul akibat konflik dagang dan persaingan teknologi. Saat ini, lebih dari 70% bahan baku untuk sektor elektronik Indonesia masih diimpor dari Tiongkok (Kemenperin, 2021),

meningkatkan kerentanan terhadap gangguan rantai pasok bila ketegangan geopolitik memburuk. Penelitian oleh Handley dan Limão (2017) menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap satu sumber utama impor memperbesar risiko guncangan eksternal, yang dapat memperlambat pertumbuhan sektor industri.

Selain itu, persaingan teknologi global membawa konsekuensi berupa meningkatnya ancaman spionase industri dan serangan siber. Memperkuat sistem keamanan siber nasional menjadi semakin penting. Studi Jayasuriya (2020) mengenai keamanan digital ASEAN mengungkapkan bahwa eskalasi ketegangan global seringkali diikuti dengan lonjakan serangan siber, khususnya terhadap negara-negara yang memiliki peran strategis dalam rantai pasok teknologi.

Tantangan besar lainnya adalah memperbaiki daya saing iklim investasi

nasional. Berdasarkan laporan Doing Business (World Bank, 2020), peringkat Indonesia dalam kemudahan berbisnis masih tertahan di posisi ke-73, lebih rendah dibanding Vietnam (ke-70) dan Thailand (ke-21). Penelitian Nguyen dan Tran (2019) menyoroti pentingnya reformasi perizinan, kemudahan investasi, dan pembangunan infrastruktur dalam menarik perusahaan multinasional untuk merelokasi operasional mereka.

Fragmentasi rantai pasok global akibat perang dagang menuntut Indonesia untuk segera menyesuaikan strategi industri dan perdagangan agar tetap kompetitif. Negara-negara seperti Vietnam berhasil memanfaatkan kondisi ini karena konsistensi reformasi struktural dan pembangunan infrastruktur. Menurut Petri dan Plummer (2020), Vietnam menjadi salah satu penerima manfaat terbesar dari fragmentasi rantai pasok berkat kecepatan adaptasi mereka.

Tingginya ketergantungan sektor elektronik Indonesia terhadap bahan baku impor dari Tiongkok tetap menjadi salah satu titik rawan yang harus segera diatasi. Untuk itu, diversifikasi sumber bahan baku serta pengembangan industri komponen domestik harus dipercepat. Kimura dan Obashi (2019) menyatakan bahwa memperluas sumber pasokan dan memperkuat produksi dalam negeri merupakan langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan industri di tengah ketidakpastian global.

Di sisi lain, ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat dan Tiongkok turut memicu eskalasi aktivitas militer di Laut China Selatan. Sebagai negara yang memiliki kepentingan langsung di kawasan tersebut, Indonesia perlu meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah Natuna. Menurut data Kementerian Pertahanan, anggaran untuk memperkuat pertahanan maritim meningkat 21% pada tahun 2023, dengan fokus pada modernisasi radar dan kapal patroli. Storey (2020) mengingatkan bahwa intensifikasi kehadiran militer di Laut China Selatan memperbesar risiko konflik maritim, sehingga Indonesia perlu mengambil pendekatan diplomatik yang aktif sembari memperkuat kemampuan pertahanan nasional.

Solusi Strategis

Dalam menghadapi dampak luas dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan strategis yang bersifat menyeluruh dan lintas sektor. Salah satu konsep yang relevan adalah penerapan Whole of Government Approach, yang mengintegrasikan peran

berbagai kementerian seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menyusun kebijakan nasional yang terkoordinasi dan adaptif terhadap dinamika global. Christensen dan Læg Reid (2007) menegaskan bahwa model kerja lintas sektor ini terbukti efektif dalam menangani persoalan kompleks seperti konflik ekonomi internasional.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat Pertahanan Ekonomi Nasional, Indonesia perlu membangun ketahanan ekonomi berbasis pengembangan industri domestik, digitalisasi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta percepatan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA). Hausmann, Hwang, dan Rodrik (2007) menunjukkan bahwa peningkatan kompleksitas produk nasional melalui hilirisasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan memperkuat daya tahan terhadap guncangan eksternal.

Pemerintah juga perlu merancang *National Supply Chain Resilience Roadmap* untuk memperkuat ketahanan rantai pasok dan produksi strategis, khususnya di sektor pertahanan, energi, dan pangan. Sheffi (2007) dalam studinya tentang ketahanan rantai pasok menekankan pentingnya membangun jaringan logistik nasional yang tangguh guna mempertahankan stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian geopolitik.

Dalam hal investasi, percepatan harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, pembangunan kawasan industri berbasis teknologi tinggi, serta penyederhanaan proses perizinan – misalnya memangkas waktu perizinan dari rata-rata 18 hari menjadi di bawah 7 hari – perlu segera diwujudkan. *World Bank* (2020) dalam *Doing Business Report* menyoroti bahwa kemudahan perizinan dan regulasi yang sederhana menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya tarik investasi suatu negara. Vietnam, sebagaimana dicatat oleh Nguyen dan Tran (2019), berhasil menarik investasi besar melalui reformasi administratif dan pembangunan kawasan industri modern.

Selain itu, dorongan terhadap hilirisasi industri harus terus diperkuat untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku dan meningkatkan nilai tambah produk ekspor. Kimura dan Obashi (2019) menyatakan bahwa negara-negara di Asia Timur yang berhasil mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor melalui hilirisasi menunjukkan ketahanan ekonomi yang lebih baik di tengah ketegangan perdagangan global.

Di sisi pertahanan, peningkatan kapasitas TNI di wilayah perbatasan strategis menjadi kebutuhan mendesak. Modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista),

penempatan pasukan, serta pembangunan sistem radar di kawasan seperti Natuna diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan dampak meluas dari ketegangan AS-Tiongkok di Laut Cina Selatan. Storey (2020) memperingatkan bahwa negara-negara di sekitar Laut Cina Selatan perlu meningkatkan kapabilitas pertahanan maritim mereka karena meningkatnya potensi konflik terbuka di kawasan tersebut.

Strategi pertahanan ini harus diintegrasikan ke dalam perencanaan ekonomi nasional melalui konsep *economic ulanningq* dalam RPJMN. Salah satunya dengan mendorong pengembangan industri pertahanan berbasis *lual-usc "chnology* (teknologi sipil dan militer) serta memperkuat kapasitas TNI AL untuk memperluas kehadiran di jalur strategis seperti Selat Malaka dan Natuna.

Brzoska (2012) menekankan bahwa integrasi antara strategi ekonomi dan pertahanan menjadi faktor krusial untuk menjamin keamanan nasional dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Terakhir, diplomasi ekonomi proaktif harus menjadi bagian utama dari kebijakan luar negeri Indonesia. Upaya ini mencakup negosiasi bilateral dengan Amerika Serikat untuk mendapatkan keringanan tarif bagi produk ekspor Indonesia, serta memperluas kerja sama ekonomi dengan mitra strategis seperti Jepang, India, Uni Eropa, dan negara-negara Asia lainnya. Dent (2010) dalam studinya tentang diplomasi ekonomi Asia menegaskan bahwa diplomasi ekonomi yang aktif dapat menjadi instrumen penting untuk melindungi dan memperluas kepentingan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

D. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok berdampak kompleks terhadap perekonomian Indonesia, menghadirkan peluang dan tantangan. Indonesia mencatat surplus perdagangan dengan Amerika Serikat, namun ketergantungan pada pasar Tiongkok dan impor bahan baku memperbesar kerentanan ekonomi domestik, tercermin dalam penurunan harga komoditas utama, depresiasi nilai tukar, dan kegagalan menarik relokasi industri. Temuan ini menunjukkan bahwa reformasi struktural, penguatan sektor manufaktur domestik, diversifikasi pasar ekspor, dan percepatan hilirisasi industri sangat diperlukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Selain itu, penguatan pertahanan di wilayah strategis seperti Natuna, sistem pertahanan siber, dan diplomasi

ekonomi juga harus diperkuat untuk menghadapi ketegangan geopolitik. Rekomendasi untuk pemerintah mencakup penerapan *Whole of Government Approach* untuk mengintegrasikan kebijakan antar sektor, harmonisasi regulasi investasi, pengembangan *National Supply Chain Resilience Roadmap*, serta penyelarasan strategi pertahanan dan ekonomi nasional. Penyederhanaan perizinan, pengembangan kawasan industri berbasis teknologi tinggi, dan digitalisasi UMKM juga penting untuk meningkatkan daya saing global Indonesia. Untuk penelitian ke depan, disarankan penggunaan pendekatan kuantitatif dan longitudinal untuk menganalisis dampak jangka panjang perang dagang terhadap sektor-sektor ekonomi Indonesia, dengan fokus pada adaptasi korporasi di tingkat mikroekonomi dan evaluasi kebijakan mitigasi pemerintah, serta kajian komparatif respons negara-negara ASEAN terhadap perang dagang guna memperkaya pemahaman tentang strategi peningkatan resiliensi ekonomi kawasan.

E. Daftar Pustaka

- Acharya, A. (2014). *Constructing a security community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of regional order*. Routledge.
- Ahn, J. (2022). The Phase One Trade Agreement: Outcomes and Perspectives. *Journal of International Economic Law*, 25(1), 15–32.
- Autor, D., Dorn, D., & Hanson, G. (2025). On the Persistence of the China Shock. *American Economic Review*, 115(2), 47–86.
- BKPM. (2021). *Laporan Kinerja Penanaman Modal 2021*. Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Bogdan, R., & Taylor, S. J. (1975). *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Sciences*. Wiley.
- Bown, C. P. (2020). US-China Trade War Tariffs: An Up-to-Date Chart. *Peterson Institute for International Economics*.
- Brzoska, M. (2012). Defence economics in the 21st century: Defining a research agenda. *Defence and Peace Economics*, 23(2), 125–130.
- Carney, R. (2021). The New Trade Wars: How Protectionism Reshapes Global Trade Networks. *Global Policy Journal*.
- Chen, W., Wang, Y., & Zhang, L. (2024). China's Tariff Policy Adjustments Amid Global Trade Tensions. *China Economic Review*, 79(1), 102–113.
- Christensen, T., & Lægreid, P. (2007). The Whole-of-Government Approach to Public Sector Reform. *Public Administration Review*, 67(6), 1059–1066.
- Dent, C. M. (2010). China, Japan and regional leadership in East Asia: Potential conflict between soft power and hard power. *International Relations of the Asia-Pacific*, 10(2), 247–275.

- Elsah, L. (2021). Dampak Perang Dagang terhadap Kinerja Perusahaan Perkebunan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 21(3), 198–210.
- Evenett, S. J., & Fritz, J. (2019). Economic Sanctions: Spillover Effects and Measures of Effectiveness. *Global Trade Alert*.
- Fang, A., & Kennedy, S. (2019). The US-China Trade War: Assessing the Impact. *Center for Strategic and International Studies (CSIS)*.
- Handley, K., & Fazio, G. (2021). Trade Policy Uncertainty, Tariffs, and Global Supply Chains. *Review of Economics and Statistics*, 103(4), 641–658.
- Handley, K., & Limão, N. (2017). Policy Uncertainty, Trade, and Welfare: Theory and Evidence for China and the United States. *American Economic Review*, 107(9), 2731–2783.
- Hausmann, R., Hwang, J., & Rodrik, D. (2007). What you export matters. *Journal of Economic Growth*, 12(1), 1–25.
- Ilhamsyah, M., & Arisyahidin, F. (2019). Dampak Ketidakpastian Global terhadap Stabilitas Nilai Tukar di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 23(2), 215–230.
- Jayasuriya, K. (2020). Cybersecurity Governance in Southeast Asia: Problems and Prospects. *Asia Policy*, 15(1), 68–93.
- Kemenkeu. (2020). *Statistik Ekonomi dan Fiskal Indonesia 2019*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2025, April 16). *Perang dagang AS–Tiongkok: Dampak, peluang, tantangan, dan solusi strategis bagi Indonesia*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan.

<https://www.kemhan.go.id/balitbang/2025/04/16/perang-dagang-as-tiongkok-dampak-peluang-tantangan-dan-solusi-strategis-bagi-indonesia.html>

Kemenperin. (2021). *Laporan Tahunan Industri Elektronika*. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

Kimura, F., & Obashi, A. (2019). Production Networks in East Asia: Geographical Extent and the Implication of TPP and RCEP. *Journal of Asian Economics*, 59, 3–15.

Lardy, N. R. (2020). *The State Strikes Back: The End of Economic Reform in China?* Peterson Institute for International Economics.

Munawaroh. (2019). Dampak Perang Dagang Amerika-Tiongkok terhadap Perdagangan Internasional Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 13(2), 110–125.

Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nguyen, T., & Tran, P. (2019). The Impact of Investment Climate on FDI Inflows in Vietnam. *Journal of Asian Business and Economic Studies*, 26(2), 135–152.

Nor Hadi, Yuliana, & Widodo. (2020). Psychological Effects of Trade War on Emerging Markets: Evidence from Indonesia. *Emerging Markets Finance and Trade*, 56(12), 2830–2845.

Petri, P. A., & Plummer, M. G. (2020). East Asia Decouples from the United States: Trade War, COVID-19, and East Asia's New Trade Blocs. *Brookings Institution*.

Sheffi, Y. (2007). *The Resilient Enterprise: Overcoming Vulnerability for Competitive Advantage*. MIT Press.

Simanjuntak, R. (2023). Dampak Proteksionisme Global terhadap Sektor Manufaktur Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Industri*, 11(1), 45–62.

Sjahrir, B. S. (2020). Peluang Investasi Indonesia di Tengah Gejolak Perang Dagang Global. *Jurnal Manajemen Strategis*, 25(1), 67–78.

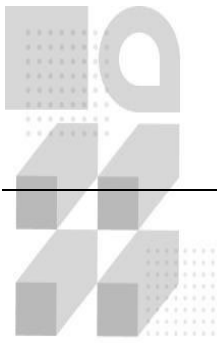
Storey, I. (2020). Southeast Asia and the South China Sea Disputes: Balancing Rights and Regional Stability. *Asian Survey*, 60(2), 345–368.

USTR. (2020). *Economic Impact of Section 301 Tariffs*. Office of the United States Trade Representative.

USTR. (2024). *Section 301 Investigation: Update on Tariff Measures Against China*. Office of the United States Trade Representative.

World Bank. (2020). *Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies*. Washington, DC: World Bank.

World Bank Commodity Data. (2020). *Commodity Markets Outlook*. World Bank Group.



Muh Nur alifath, Hadaria H Haeruddin
Jurnal Interdisiplin (*JUNTER*) Vol . 1 No. 5 (2025) 42 – 59

JURNAL EKSOPODA

Journal of Interdisipliner



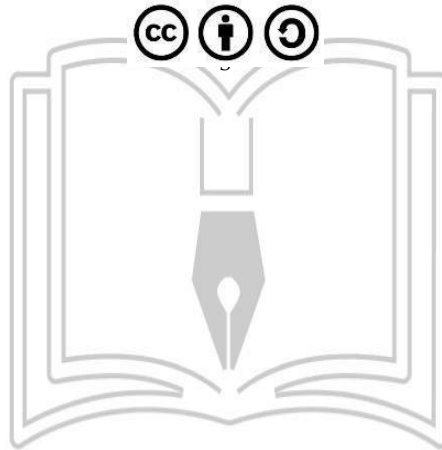
Copyright Holder :

© Name Author. et. al. (2024).

First Publication Right :

© JUNTER : Jurnal Interdisiplin

This article is under:



JUNTER

Jurnal Interdisipliner

